

BIDANG
ILMU SOSIAL

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN MANDIRI**



**MASTERPLAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
KOTA PASURUAN**

**Ketua Peneliti :
Dr. H. Fajar Supanto, SE.,MSi.**

**Anggota Peneliti:
Umu Khourah, SE.,MSi.**

**JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
DESEMBER 2012**

**BIDANG
ILMU SOSIAL**

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN MANDIRI**



**MASTERPLAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
KOTA PASURUAN**

**Ketua Peneliti :
Dr. H. Fajar Supanto, SE.,MSi.**

**Anggota Peneliti:
Umu Khouroh, SE.,MSi.**

**JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
DESEMBER 2012**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**

1. Judul : MASTERPLAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL KOTA PASURUAN

2. Ketua Peneliti

2.1 Data Pribadi

a. Nama Lengkap : Dr. H. Fajar Supanto, SE.,MSi.
b. Jenis Kelamin : L
c. NIP/Golongan : 651 - FE / 3d
d. Srata/Jab. Fungsional : S3 / Lektor Kepala
e. Jabatan Struktural : -
f. Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Manajemen
g. Bidang Ilmu : Sosial
h. Alamat Kantor : Jl. Ters. Raya Dieng 62-64 Malang
i. Telepon/Faks/E-mail : 0341-568395 psw 548 / 0341-564994 / haji_fajar@yahoo.com
j. Alamat Rumah : Puncak Buring Indah B6/54
k. Telepon/Faks/E-mail : 0341-751519/myfajar@gmail.com

2.2 Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Umu Khouruh, SE.,MSi.
b. Bidang Keahlian : Kewirausahaan & Usaha Mikro Kecil & Menengah
c. Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Manajemen
d. N I P : 197206172005012003

3. Lokasi Penelitian : Kota Pasuruan

4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

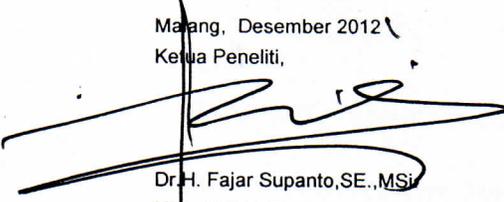
5. Pembiayaan :

Biaya Mandiri	Rp. 6.500.000,00
Biaya Instansi Lain	Rp. 88.550.000,00
	<hr/>
	Rp. 95.050.000,00

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. M. Burhan, MM
NIP. 509 / FE

Malang, Desember 2012
Ketua Peneliti,


Dr. H. Fajar Supanto, SE.,MSi
NIP. 651 / FE

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


Prof. H. H. Agus Suprpto, MSc, Ph.D.
NIP. 312 FT



KATA PENGANTAR

Laporan Penelitian Mandiri dengan judul Masterplan Pengembangan Penanaman Modal Kota Pasuruan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti yang berisi gambaran infrastruktur ekonomi, potensi, masalah dan roadmap Pengembangan Penanaman Modal Kota Pasuruan meliputi: kebijakan umum Pemerintah Kota Pasuruan terkait penanaman modal, isu strategis dan rencana aksi secara periodik selama 5 (lima) tahun ke depan.

Hasil Laporan Akhir srtudi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbagai program pengembangan penanaman modal di Kota Pasuruan serta berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang relevan dengan potensi pengembangan penanaman modal di Kota Pasuruan.

Kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama investor maupun calon investor serta pemerintah daerah yang selama ini menaruh perhatian dan kepedulian terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal di masa yang akan datang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses studi penyusunan masterplan penanaman modal kota pasuruan. Kami membuka diri terhadap saran dan kritik terhadap hasil laporan akhir ini.

Pasuruan, Desember 2012

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal .
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Sasaran	6
1.4 Landasan Hukum	6
1.5 Pendekatan dan Metode	7
1.5.1. Pendekatan Kegiatan	7
1.5.2 Desain Kegiatan	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	9
1.5.4 Metode Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	17
2.1 Investasi	17
2.2 Teori Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	18
2.3 Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	22
2.4 Sektor Potensial dalam Pengembangan Wilayah	23
2.5 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Sebagai Penghela Aktivitas Ekonomi	25
BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONDISI EKONOMI KOTA PASURUAN	27
3.1 Gambaran Umum Kota Pasuruan	27
3.1.1 Kondisi Geografis	27
3.1.2 Kondisi Administratif	27
3.1.3 Kondisi Topografi	28
3.1.4 Kondisi Demografis	29
3.2 Kondisi Ekonomi Kota Pasuruan	31

3.2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan	31
3.2.2	Struktur Ekonomi Kota Pasuruan	33
3.2.3	Kebijakan Fiskal Kota Pasuruan	34
3.3	Potensi Ekonomi Kota Pasuruan	39
3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan	39
3.3.2	Hortikultura	40
3.3.3	Perkebunan	41
3.3.4	Peternakan	41
3.3.5	Perikanan	42
3.4	Sumber Daya Manusia Kota Pasuruan	44
3.4.1	Angkatan Kerja dan Pengangguran	44
3.4.2	Kemiskinan	45
3.5	Kondisi Infrastruktur Dasar Kota Pasuruan	46
3.5.1	Fasilitas Pendidikan	46
3.5.2	Fasilitas Kesehatan	47
3.5.3	Sarana dan Prasarana Transportasi Umum	47
3.5.4	Sarana dan Prasarana Perhubungan	48
3.5.5	Listrik	50
3.5.6	Air Bersih	51
3.5.7	Pos Dan Telekomunikasi	52
3.6	Kondisi Infrastruktur Ekonomi Kota Pasuruan	53
3.6.1	Lembaga Keuangan, Koperasi dan UMKM	53
3.6.2	Fasilitas Perdagangan	54
3.7	Pemanfaatan Lahan Kota Pasuruan	55
3.8	Kinerja Investasi Kota Pasuruan	58
3.8.1	Investasi dan Nilai Produksi	58

BAB IV	ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA PASURUAN	62
4.1	Visi dan Misi Jangka Panjang Kota Pasuruan	62
4.2	Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Kota	66

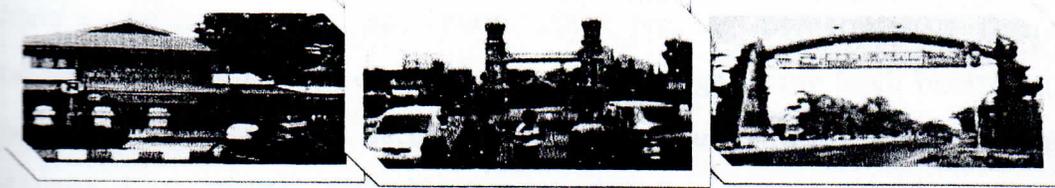
	Pasuruan	
	4.3 Arah Kebijakan Dan Isu Pembangunan Kota Pasuruan	68
BAB V	PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL KOTA PASURUAN	77
	5.1 Potensi Investasi dan Penanaman Modal Kota Pasuruan	77
	5.1.1 Sektor Unggulan Kota Pasuruan	77
	5.1.2 Tipologi Ekonomi Kota pasuruan	79
	5.1.3 Identifikasi Potensi dan Masalah Pemanfaatan Lahan Terkait Dengan Kepentingan Ekonomi	81
	5.1.3.1 Identifikasi Potensi dan Masalah Kawasan Strategis	81
	5.1.3.2 Identifikasi Potensi dan Masalah Wilayah Sebagai Kawasan Strategis	
	5.1.4 Penetapan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Kepentingan Ekonomi	85
	5.1.4.1 Kawasan Perdagangan	85
	5.1.4.2 Kawasan Sektor Informal	86
	5.1.4.3 Kawasan Industri	87
	5.1.5 Potensi dan Peluang Investasi	87
	5.2 Arah Kebijakan dan Isu Pembangunan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan	89
	5.2.1 Visi dan Misi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan	89
	5.2.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	91
	5.3 Rencana dan Rumusan Strategis Pengembangan Penanaman Modal Kota Pasuruan	93
	5.3.1 Rencana dan Rumusan Strategis Pengembangan Penanaman Modal Kota Pasuruan	93
	5.3.3. Rumusan Strategis	95
	5.4 Road Map Pengembangan Penanaman Modal Kota Pasuruan	97
	5.4.1 Isu Strategis	98

5.4.2 Faktor Kunci Keberhasilan	98
5.4.3 Road Map Pengembangan Penanaman Modal	99

BAB VI PENUTUP	116
----------------	-----

DAFTAR TABEL

		Hal .
Tabel 3.1	Kondisi Administratif Kota Pasuruan	28
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kota Pasuruan	29
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	30
Tabel 3.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan	32
Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	33
Tabel 3.7	Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan	34
Tabel 3.8	Perkembangan Agregat Ekonomi Kota Pasuruan	34
Tabel 3.9	Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan	37
Tabel 3.10	Luas Areal dan Produksi Tanaman Pangan Kota Pasuruan	40
Tabel 3.11	Jumlah dan Produksi Buah-buahan Kota Pasuruan	40
Tabel 3.12	Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Kota Pasuruan	41
Tabel 3.13	Banyak Ternak Besar Per Kecamatan Dalam Ekspor	41
Tabel 3.14	Produksi Hasil Ternak Kota Pasuruan	42
Tabel 3.15	Jenis Peralatan Penangkapan Ikan Kota Pasuruan	43
Tabel 3.16	Luas dan Hasil Tambak Kota Pasuruann Kerja	43
Tabel 3.17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Pasuruan	44
Tabel 3.18	Kondisi Keluarga Kota Pasuruan	45
Tabel 3.19	Sarana Pendidikan di Kota Pasuruan	46
Tabel 3.20	Sarana Kesehatan di Kota Pasuruan	47
Tabel 3.21	Infrastruktur Jalan di Kota Pasuruan	48
Tabel 3.22	Kegiatan Pelabuhan di Kota Pasuruan	50
Tabel 3.23	Data Pelanggan, Daya dan Pemakaian Listrik di Kota Pasuruan	51
Tabel 3.24	Jumlah Pelanggan Berdasarkan Kelompok (Jiwa)	52
Tabel 3.25	Data Air Yang Terjual di Kota Pasuruan	52
Tabel 3.26	Profil Koperasi di Kota Pasuruan 2007 – 2011	54
Tabel 3.27	Fasilitas Perdagangan Kota Pasuruan	55
Tabel 3.28	Total Investasi dan Nilai Produksi Kota Pasuruan	59
Tabel 3.29	Jumlah Ijin Usaha dan Nilai Investasi Kota Pasuruan	60
Tabel 3.30	Komoditas Ekspor Kota Pasuruan	60
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Badan Penanaman Modal Kota Pasuruan	61
Tabel 5.1	Sektor dan Komoditas Unggulan Kota pasuruan	77



PENDAHULUAN

BAB 1

1.1 Latar Belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi Pelayanan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan dan berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*), dan Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good*, seperti jalan ,jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan.

Sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan perlu melakukan upaya konkrit menarik investasi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan dan mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan.

Salah satu indikator keberhasilan dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi adalah banyaknya kegiatan investasi yang ada. Oleh karena itu sebagai daerah yang bercirikan kota, investasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Kegiatan investasi dan penanaman modal lebih ditekankan pada upaya pemanfaatan potensi lokal dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan berbagai alternative investasi. Oleh karena itu swasta dan masyarakat perlu terus didorong dan ditingkatkan untuk mengembangkan usaha termasuk menentukan pilihan kegiatan pembangunan.

Dalam kerangka otonomi daerah, kegiatan pada bagian perekonomian dan penanaman modal dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pemangku kepentingan terhadap perubahan

arah dan nafas pembangunan. Semua komponen yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan, dititikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan melalui kemitraan dan kerjasama strategis dengan berbagai pihak yang dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang bernilai tinggi dan berkelanjutan.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu pada hakekatnya memiliki dua prinsip yaitu :

1. Memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat dan pihak swasta untuk menentukan sendiri kebutuhan akan investasi, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Menyediakan dukungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan diperlukan peningkatan investasi yang signifikan baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Makin besar arus masuk investasi dapat menciptakan peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha yang lain. Impikasinya antara lain, meningkatnya kesempatan kerja dan peluang terjadinya peningkatan PAD. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat penanaman modal langsung (*direct investment*) selain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke pasar dunia, dan transfer kemampuan manajerial.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi, pemerintah Kota pasuruan telah melakukan berbagai upaya di antaranya adalah dengan peningkatan program promosi dan pengembangan kerjasama regional,

nasional maupun internasional. Dengan semakin mantap akan dikembangkannya Kota Pasuruan sebagai pusat perniagaan melalui kegiatan perdagangan, industri dan jasa berskala nasional dan internasional, maka pemahaman yang lebih menyeluruh tentang arti penting pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dikembangkan dan dijadikan dasar pengembangan investasi.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup rakyat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat serta mendorong agar pertumbuhan ekonomi selalu berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai ini mengandung konsekuensi bahwa penggalian potensi-potensi yang terdapat di daerah senantiasa dilakukan untuk mendorong tumbuhnya investasi baru yang dapat menstimulus perekonomian ke arah yang lebih maju.

Berdasarkan data perkembangan investasi tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Peningkatan nilai investasi selama tiga tahun terakhir ini tidak terlepas dari peran kelembagan yang menaungi bidang penanaman modal. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan penanaman modal di Kota Pasuruan, untuk menarik minat investor maka Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini BPM-PPT menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang kegiatan dan perkembangan

penanaman modal dalam jangka panjang yang akan menjadi referensi bagi kegiatan penanaman modal

di Kota Pasuruan. Untuk mengoperasionalkan *Grand Strategy* Investasi diperlukan perencanaan yang lebih detail yang mencakup perencanaan dan indikator program tahunan, serta dalam pengembangan pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah untuk merencanakan program investasi tahunan yang tercakup dalam suatu dokumen Masterplan Penanaman Modal.

Kedudukan dokumen Masterplan Pengembangan Penanaman Modal ini diarahkan sebagai panduan atau pedoman bagi perencanaan investasi yang akan dilakukan dan dikembangkan pada Kota Pasuruan yang digunakan sebagai acuan bagi pengembangan investasi yang penyusunannya mengacu dan terintegrasi dengan *Grand Strategy* yang telah disusun sebelumnya, sehingga kedudukan *Master plan* Investasi ini sebagai suatu wadah hukum dalam mengintegrasikan setiap kebijakan investasi.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal adalah menyusun perencanaan penanaman modal dimana dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat dijadikan acuan baik bagi pelaku usaha, SKPD, dan pihak lain yang berkepentingan.

Tujuan yang hendak dicapai pada penyusunan dokumen Master Plan Pengembangan Penanaman Modal adalah :

1. Sebagai referensi untuk pembuatan studi kelayakan pada skala mikro oleh para investor.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan penanaman modal daerah
3. Sebagai referensi dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal

4. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan penanaman modal di Kota Pasuruan.
5. Sebagai informasi untuk publik secara terpadu, terbuka dan dengan akses yang seluas-luasnya bagi investor dan SKPD yang terkait di Kota Pasuruan.

1.3 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai melalui penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal antara lain:

1. Teridentifikasinya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penanaman modal di Kota Pasuruan.
2. Teridentifikasinya program atau kegiatan penanaman modal
3. Tersusunnya dokumen perencanaan mengenai kegiatan pengembangan penanaman modal baik untuk investor maupun SKPD yang berwenang dalam pemberian perizinan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguann Nasional (SPPN)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2010-2015
8. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan 2011-2015.

1.5 Pendekatan dan Metode Kegiatan

1.5.1 Pendekatan Kegiatan

Kajian Masterplan Pengembangan Penanaman Modal menggunakan desain penelitian kebijakan dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode untuk menggambarkan kondisi yang ada berupa data, fakta dan informasi sebagai landasan *empiris* yang penggambarannya dilakukan secara *naratif*, baik terhadap data kualitatif maupun data kuantitatif untuk menghasilkan rekomendasi mengenai kondisi Kajian Masterplan pengembangan penanaman modal yang nantinya akan menjadi bahan bagi percepatan penanaman modal yang dimaksud.

1.5.2 Desain Kegiatan

Desain kegiatan Masterplan pengembangan penanaman modal ini adalah melakukan kajian kondisi eksisting wilayah, perkembangan investasi, kebutuhan investasi, kebutuhan infrastruktur penunjang pengembangan, selanjutnya menyusun masterplan berdasarkan kondisi saat ini dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, Rencana Jangka Menengah Daerah 2010- 2015.

Survei penelitian ini dilakukan dengan survei instansional dan survei lapangan. Adapun tahapan dalam pokok-pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan kompilasi data adalah suatu tahap proses seleksi data, tabulasi data dan mengelompokkan/mensistematisasikan data sesuai dengan yang diperlukan di dalam penyusunan master plan. Pengerjaannya bisa melalui cara sederhana – manual atau dengan menggunakan komputer sesuai dengan rumitnya informasi dan data yang diolah. Hasilnya disajikan menurut urutan table angka-angka, diagram dan* peta, yang disusun sedemikian rupa, sehingga mudah dibaca serta siap untuk dianalisis.

2. Jenis data dan sistematikanya adalah sebagai berikut :
 - a. Kebijakan Daerah yang diduga berpengaruh pada perkembangan pengembangan penanaman modal yang direncanakan, antara lain :
 - 1) Kebijakan sektoral,
 - 2) Pola umum pembangunan daerah jangka panjang – jangka menengah,
 - 3) Kebijakan pengembangan penanaman modal
 - 4) Investasi pembangunan sektor infrastruktur yang sudah dilaksanakan maupun yang direncanakan.
 - b. Aspek kependudukan, antara lain :
 - 1) Jumlah dan penyebaran penduduk,
 - 2) Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lapangan kerja, pendapatan dan lain sebagainya,
 - 3) Perkembangan penduduk, dalam hal jumlah, penyebaran, dan komposisi,
 - c. Aspek perekonomian, antara lain :
 - 1) Potensi Ekonomi Wilayah
 - 2) PRDB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 3) Produksi tiap sektor kegiatan ekonomi dan penyebarannya,
 - 4) Perkembangan tiap sektor kegiatan ekonomi,
 - d. Aspek fisik dasar, antara lain :
 - 1) Keadaan iklim,
 - 2) Keadaan topografi,
 - 3) Keadaan geologi dan struktur tanah,
 - 4) Keadaan hidrologi.
 - e. Aspek infrastruktur, pelayanan dan prasarana, antara lain :
 - 1) Jenis fasilitas yang ada, jumlah dan penyebarannya untuk menunjang kegiatan ekonomi,
 - 2) Jenis-jenis prasarana infrastruktur seperti jalan, listrik, air minum, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya,

- 3) Kemudahan hubungan (tingkat aksesibilitas),
 - 4) Perkembangan mengenai pengadaan fasilitas infrastruktur, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya.
- f. Aspek administrative/aspek pengelolaan pembangunan, antara lain :
- 1) Keadaan keuangan daerah, mengenai volume anggaran, bantuan dari Pusat dan Daerah Tingkat I, pajak dan redistribusi ditinjau menurut sumbernya, beserta perkembangannya,
 - 2) Keadaan status pemilikan tanah, Keadaan harga tanah dan bangunan secara umum,
 - 3) Peraturan-peraturan Daerah atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah lainnya tentang pelaksanaan pengembangan penanaman modal.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Masterplan membutuhkan berbagai data primer yang digali melalui survei lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui survai instansional. Adapun kebutuhan data primer dan data sekunder yang dibutuhkan meliputi :

1. Survai Data Instansional, berupa pengumpulan dan atau perekaman data dari instansi-instansi. Hasilnya adalah uraian, data angka atau peta, mengenai keadaan regional, mengenai keadaan daerah keseluruhan dan mengenai kota/kecamatan/kelurahan.

Data sekunder yang harus dicari meliputi laporan dari hasil studi terdahulu yang pernah ada dan data lainnya yang berhubungan dengan penyusunan master plan. Semua data-data sekunder terutama yang berasal dari studi terdahulu, harus dilakukan pengecekan tingkat akurasiannya, sehingga validitas data dapat dipercaya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar evaluasi secara terintegrasi dan komprehensif.

Data yang diperlukan dalam penyusunan master plan, dikumpulkan dari laporan-laporan studi yang telah ada dari pihak Pemrakarsa maupun Dinas-dinas dan instansi yang ada kaitannya dengan studi ini, seperti :

- a. Pemrakarsa : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
 - b. Dinas Perhubungan data kondisi jalan dan arus lalu lintas, rencana pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pelabuhan, terminal, pasar induk.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum seperti data perencanaan kegiatan proyek sejenis.
 - d. Bappeda seperti data rencana tata ruang dan tata guna lahan, rencana pengembangan wilayah, peruntukan lahan dan sebagainya.
 - e. Dinas-dinas terkait
2. **Survai Lapangan**, berupa pengecekan keadaan lapangan. Data yang perlu adalah letak insfrastruktur, pusat-pusat pemukiman dan lain sebagainya yang dipandang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan daerah

1.5.4 Metode Analisis Data

Di dalam tahap analisis, pokok-pokok pekerjaan yang akan dilakukan Konsultan dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Analisis keadaan dasar adalah menilai kondisi eksisting pada saat sekarang.
2. Analisis kecenderungan perkembangan, yaitu menilai kecenderungan sejak masa lalu sampai sekarang dan kemungkinan-kemungkinannya di masa depan terutama pengaruh tumbuhnya fungsi baru terhadap perkembangan daerah terutama pada pelayanan infrastruktur ekonomi.
3. Analisis kemampuan pengelolaan pembangunan, yaitu menilai kondisi keuangan daerah, organisasi pelaksana, pengawasan pembangunan personalia, baik pada saat sekarang maupun yang diperlukan di masa depan.

Untuk setiap data yang telah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tata Ruang dan Tata Guna Lahan

Tujuan dari analisa adalah untuk mengidentifikasi keadaan fisik wilayah, yaitu

dengan memperjelas mekanisme perkembangan dan penyebab-penyebabnya. Penganalisaan kondisi dilaksanakan dengan mencoba mengetahui sejauh mana korelasi antara elemen daerah dan menyimpulkannya keadaan struktur permasalahannya. Sejalan dengan hal tersebut analisis meliputi:

- a. Analisis kemampuan tumbuh dan berkembangnya Daerah, antara lain tentang: potensi wilayah dan permasalahannya, sehingga didapati gambaran hubungan atau ketergantungan. Pengaruh potensi dan permasalahan pengembangan sektor-sektor kegiatan, sehingga diperoleh gambaran hubungan atau ketergantungan antar sektor.
- b. Analisa kedudukan Daerah dalam perimbangan dengan daerah-daerah lainnya.
- c. Analisa pengaruh kebijaksanaan regional terhadap perkembangan sektor-sektor kegiatan.

Data Ruang dan Tata Guna Lahan yang dikumpulkan dibandingkan dengan lahan dan ruang yang direncanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Analisis dilakukan terhadap tata ruang makro terutama ditujukan pada tata guna lahan, penutupan/pembukaan lahan, pemukiman, sistem transportasi, ketersediaan fasilitas lingkungan, kawasan rekreasi, serta kegiatan-kegiatan lain. Juga diidentifikasi beberapa komponen lingkungan lainnya yang sensitif terhadap perubahan komponen tersebut. Pendekatan analisis tata ruang dalam studi ini dilakukan dengan cara komparasi, interpretasi peta dan penelitian lapangan.

Komparasi interpretasi juga dilakukan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai tata ruang. Analisis terhadap ruang dan lahan dilakukan dengan membandingkan kondisi tata guna lahan yang dikaitkan dengan perencanaan tata ruang yang ada, kemudian dilanjutkan dengan melihat kemungkinan adanya konflik antara komponen-komponen tersebut. Lokasi rencana kegiatan adalah di wilayah daerah, yang berfungsi menghubungkan beberapa aktivitas sekitarnya yang terintegrasi. Data sekunder untuk aspek tata ruang mikro yang berkaitan infrastruktur. Kajian aspek tata

ruang dan tata guna lahan mikro berguna untuk mengetahui kesesuaian perencanaan tata ruang, sesuai kemampuan lahan, kesesuaian pelaksanaan peraturan bangunan, serta nilai estetika.

2. Analisis Sosekbud dalam Penyusunan Master Plan

Analisis Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam penyusunan Masterplan, meliputi:

a. **Analisa Kependudukan:** yang antara lain menilai tentang kecenderungan pertumbuhan, penyebaran, dan karakteristik social budaya lainnya. Data sekunder dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menafsirkan hasil-hasil perhitungan yang telah ditabulasi (persentase). Data primer yang bersifat kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan analisis tabulasi. Hasil tabulasi akan diinterpretasi berdasarkan nilai distribusi yang dinyatakan dalam persentase.

Data primer yang bersifat kualitatif dianalisis dengan metoda informal deskriptif, dan bila dipandang perlu dilakukan analisis secara analogi : pemahaman *internal logic* dari sistem tersebut (White, 1989) dengan fenomena yang mirip terjadi di daerah lain yang pernah diteliti. Dalam hal ini digunakan juga metoda penilaian ahli (profesional judgement), bila tidak dijumpai baku mutu tertentu untuk membandingkan suatu hasil temuan lapangan secara kualitatif.

b. **Analisa Perekonomian:** yang antara lain menilai tentang kecenderungan perkembangan dan perkiraan dimasa depan tiap sektor kegiatan ekonomi dalam hal kapasitas investasi, penyerapan tenaga kerja, produksi, sifat-sifat kegiatan dan prakiraan kebutuhan investasi.

c. Analisis Keadaan Infrastruktur

Analisis keadaan infrastruktur antara lain menilai tentang :

- 1) Karakteristik keadaan fasilitas infrastruktur, baik yang mengenai kegiatan wilayah pada tingkat kabupaten, maupun dengan daerah lainnya.
- 2) Prakiraan kebutuhan infrastruktur untuk melayani kegiatan, yang

menyangkut jenis dan jumlah kebutuhannya.

- 3) Prakiraan system pusat pelayanan yang dibutuhkan dalam hal pengelompokkan infrastruktur.

d. Analisis Keuangan dan Pengelolaan Daerah.

Analisis keuangan dan pengelolaan, antara lain menilai tentang:

- 1) Prakiraan pemasukan keuangan dimasa depan dengan sudah memperhitungkan kontribusi sumber yang berasal dan Pemerintah setempat
- 2) Keadaan organisasi/aparatur pelaksana, dalam hal struktur, kewenangan, personalia dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dimasa depan.
- 3) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pembangunan serta mekanisme pengendalian.

3. Analisis Sektoral

Untuk dapat menyusun sektor unggulan maupun peluang investasi di suatu daerah kedepan, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi sektor manakah yang akan menjadi sektor perekonomian utama. Proses identifikasi tersebut akan dilakukan berdasarkan penelaahan terhadap perkembangan karakteristik utama sektor perekonomian di daerah selama ini.

a. Identifikasi Kawasan Andalan

Secara umum, suatu daerah dapat diklasifikasi berdasarkan kinerja perekonomiannya. Selain klasifikasi menggunakan konsep kutub pertumbuhan, salah satu konsep yang muncul dalam studi empiris di Indonesia adalah konsep kawasan andalan. Konsep kawasan andalan ini didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, dan teori pusat pertumbuhan (Kuncoro, 1993; Syafrizal 1997; Aswandi dan Kuncoro, 2003). Alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kawasan andalan adalah apa yang disebut dengan Tipologi Klassen. Tipologi ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya

membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, maka akan diperoleh pemetaan tipologi daerah atas empat kuadran. Daerah pada Kuadran I yaitu Daerah Cepat Maju dan Cepat-Tumbuh (*high growth and high income*), daerah pada Kuadran II yaitu Daerah Maju tetapi Tertekan (*high income but low growth*), daerah pada Kuadran III yaitu Daerah Relatif Tertinggal (*low growth and low income*), dan daerah pada Kuadran IV yaitu Daerah Berkembang Cepat (*high growth but low income*) Perhatikan tabel berikut:

Tabel Tipologi Daerah
Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita

		Pertumbuhan Ekonomi	
		Rendah (< Nasional/Wilayah)	Tinggi (> Nasional/Wilayah)
Pertumbuhan	Tinggi (> Nasional/Wilayah)	Kuadran II	Kuadran I
	Rendah (< Nasional/Wilayah)	Kuadran III	Kuadran IV

PDRB Per Kapita

Gambar 1.1 Matrik Tipologi Daerah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi PDRB per Kapita

b. Location Quotient (LQ)

Dalam menganalisis kondisi perekonomian di daerah, termasuk dalam menentukan komoditas unggulan di masing-masing daerah, digunakan berbagai perangkat analisis sebagai kriteria. Analisis karakteristik perekonomian dari suatu daerah bisa didasarkan pada perkembangan Indikator Angka Location Quotient (LQ). Keunggulan indikator ini terletak kepada kemampuannya untuk mampu menunjukkan tingkat keunggulan

relatif dari suatu sektor di suatu daerah terhadap sektor tersebut di daerah-daerah lainnya dalam suatu negara. Angka LQ umumnya digunakan untuk menentukan sektor basis suatu daerah. Angka LQ ini berkisar antara 0 sampai dengan positif tak berhingga.

- 1) Angka LQ yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa sektor yang bersangkutan tidak lagi memiliki keunggulan relatif.
- 2) Bila Angka LQ sama dengan 1, maka sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang sama dengan rata-rata semua daerah.
- 3) Angka LQ yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang lebih tinggi dari rata-rata.

LQ merupakan indikator awal untuk menentukan posisi surplus/defisit suatu daerah dalam hal konsumsi/produksi tertentu. Angka $LQ > 1$ untuk sektor tertentu menunjukkan keadaan surplus, yaitu proporsi sektor yang bersangkutan melebihi proporsi sektor yang sama di nasional, atau menunjukkan keunggulan komparatif sektor tersebut, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian sektor-sektor yang mempunyai $LQ > 1$ dapat dikatakan sebagai sektor basis, sedangkan sektor yang mempunyai $LQ < 1$ dinyatakan sebagai sektor non basis.

$$LQ_i^r = \frac{E_i^r / E^r}{E_i^n / E^n}$$

di mana E = employment (dapat juga menggunakan PDRB), i = sektor, n = nasional, dan r = regional/ daerah. Jika nilai $LQ_i^r > 1$, artinya proporsi sektor i di daerah lebih besar dari proporsi sektor yang sama di tingkat nasional. Oleh karena itu jika ingin mengembangkan suatu sektor, maka lebih dulu diprioritaskan sektor yang memiliki $LQ > 1$, sebab sektor tersebut memiliki aktivitas yang tinggi/ potensial. Namun demikian LQ mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya bahwa terdapat pola pengeluaran dan selera yang berbeda di setiap daerah, adanya perbedaan

tingkat pendapatan rumah tangga antar daerah, dan adanya perbedaan produktivitas antar daerah.

4. Analisis SWOT

Analisis *SWOT* adalah instrument perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka.

Teori Analisis *SWOT* adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan *SWOT*. *SWOT* adalah sebuah singkatan dari, *S* adalah Strength atau Kekuatan, *W* adalah Weakness atau Kelemahan, *O* adalah Opportunity atau Kesempatan, dan *T* adalah Threat atau Ancaman. *SWOT* ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu.

Menurut Freddy Rangkuti (2005), *SWOT* adalah identitas berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Analisis *SWOT* membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal.